



Laporan Percepatan Pembangunan Papua



PERIODE JUNI 2025

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Provinsi Papua Barat Daya





PAPUA CERDAS



Selama bulan Juni 2025, Pokja Papua Cerdas BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya telah melaksanakan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) terhadap program prioritas di sektor pendidikan dalam rangka percepatan pembangunan di Tanah Papua, khususnya misi Papua Cerdas.

Tiga kegiatan utama yang dilaksanakan meliputi:

1. Kampanye Komitmen Wajib Belajar 13 Tahun(11 Juni 2025, SMA Negeri 1 Teminabuan – Kab. Sorong Selatan): Pokja Papua Cerdas mendorong partisipasi aktif orang tua dan pemerintah daerah dalam mengurangi angka putus sekolah. Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama.
2. Sosialisasi Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) dan Sekolah Rakyat(26 Juni 2025, Hotel Vega – Kota Sorong): Kegiatan ini menekankan pentingnya keberlanjutan program pendidikan berbasis lokal di Kabupaten Tambrau, dengan hasil identifikasi sekolah calon lokus SSH dan dukungan penuh dari Pemda Tambrau.
3. Koordinasi Percepatan Program Sekolah Gratis di Kota Sorong(26 Juni 2025, Sekretariat BP3OKP PBD): Fokus evaluasi terhadap pelaksanaan program sekolah gratis yang belum menjangkau OAP secara adil. Ditekankan perlunya evaluasi regulasi, peningkatan mutu sekolah swasta berbasis yayasan OAP, serta penyusunan Masterplan Pendidikan di Kota Sorong.



Pada bulan Juni 2025, Pokja Papua Produktif melaksanakan tugas dan fungsi SHEK (Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi) melalui beberapa kegiatan strategis yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, penguatan koperasi, ketenagakerjaan, dan dukungan terhadap UMKM Orang Asli Papua (OAP), sebagai berikut:

1. Peluncuran Koperasi Merah Putih: Dilaksanakan pada 2 Juni 2025 di Aimas, kegiatan ini bertujuan mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih pada tingkat kampung/kelurahan; Diperlukan pendampingan menyeluruh dan monitoring pelaksanaan koperasi secara teknis dan administratif oleh BP3OKP dan Dinas terkait.
2. Audiensi Tenaga Kerja bersama Disnaker Kota Sorong: Tanggal 13 Juni 2025, kegiatan ini mengidentifikasi berbagai persoalan ketenagakerjaan seperti diskriminasi tenaga kerja OAP, ketidaksesuaian kurikulum pelatihan kerja, serta lemahnya perlindungan hukum dan sistem pelaporan BPJS; Rekomendasi mencakup penyusunan Perda/Perdasus ketenagakerjaan OAP, pembaruan kurikulum pelatihan, hingga pembentukan Sekretariat Bersama ketenagakerjaan.
3. Audiensi dengan Asosiasi Mama-Mama Papua: Tanggal 20 Juni 2025, BP3OKP menerima aspirasi dan dokumen legal dari Asosiasi Mama-Mama Papua untuk penguatan program berbasis OAP melalui dana Otsus; Ditekankan pentingnya peran BP3OKP dalam mendampingi, mensosialisasikan, dan memfasilitasi akses bantuan afirmatif.
4. SHEK bersama Menteri Koperasi dan UMKM: Audiensi strategis pada 20 Juni 2025 membahas penguatan sektor UMKM berbasis komunitas lokal, terutama pengembangan Koperasi Merah Putih dan akses pembiayaan/pelatihan bagi UMKM OAP; Dirumuskan perlunya roadmap dan unit pendampingan koperasi berbasis komunitas.
5. Sosialisasi Pendataan OAP di Kabupaten Sorong: Dilaksanakan pada 24 Juni 2025 bersama Dukcapil dan MRP, kegiatan ini bertujuan memastikan data OAP terekam secara sah dan akurat untuk mendukung kebijakan afirmatif; Pendataan dijadwalkan mulai Juli–Desember 2025 dengan melibatkan verifikasi adat oleh kepala suku.





PAPUA POLHUKAM/DAMAI

Pada bulan Juni 2025, Pokja Papua Polhukam/Damai melaksanakan kegiatan koordinasi dengan **Ketua Tim Pemulangan Warga Eksodus Kabupaten Maybrat**, Melianus Saa, SH., M.Si. Pertemuan dilaksanakan pada 2 Juni 2025 di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya. Fokus utama kegiatan adalah pembahasan strategi penanganan warga eksodus akibat konflik bersenjata di Distrik Aifat Selatan dan Aifat Timur Raya, Kabupaten Maybrat.

Hasil Utama Kegiatan:

Kondisi Terkini: Diperoleh gambaran umum bahwa masyarakat masih terdampak oleh trauma, eksodus massal, dan belum terpenuhinya layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur (jalan dan jembatan).

Masalah Utama: Ketidakamanan dan trauma mendalam menjadi faktor utama penghambat pemulangan warga.

Masalah Pendukung: Ketergantungan pada aparat keamanan, hambatan reintegrasi eks-KKB, dan kendala sosial di lokasi pengungsian.

Rekomendasi & Rencana Tindak Lanjut:

Verifikasi Lapangan: BP3OKP perlu melakukan konfirmasi langsung kondisi eksodus, khususnya terkait layanan dasar.

Pemulihan Psikososial & Rasa Aman: Pemerintah harus memprioritaskan pemulihan psikologis masyarakat dan menghadirkan jaminan keamanan yang berkelanjutan.

Dukungan Pemda & Pusat: Tim pendamping eksodus kekurangan dana untuk melaksanakan program-program pemberdayaan, sehingga dibutuhkan dukungan konkret dari Pemda dan Pemerintah Pusat.

Reintegrasi Eks KKB: Dorongan agar mantan anggota KKB/OPM yang menyerahkan diri dapat diberdayakan atau dilibatkan dalam kegiatan atau program-program produktivitas (pengembangan diri).

Monitoring & Evaluasi: Perlu dilakukan Monev untuk memastikan intervensi yang tepat, seperti: pemberian beasiswa, pelatihan kerja, dan pendampingan psikososial.

Kesimpulan: Pelaksanaan Tusi Pokja Polhukam/Damai bulan Juni 2025 menunjukkan urgensi penanganan konflik sosial secara komprehensif. Upaya reintegrasi sosial, penguatan layanan dasar, serta pengembalian rasa aman menjadi kunci keberhasilan pemulangan warga eksodus secara bermartabat dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor, terutama dengan Pemda dan pusat, sangat penting untuk percepatan pemulihan di wilayah pasca-konflik.



KEGIATAN STRATEGIS BERSAMA



FGD langkah-langkah strategis penyaluran TKD dan Dana Desa Tahap I Tahun 2025-10 Juni 2025



Rapat Koordinasi Interoperabilitas Sistem Informasi Pengelolaan Dana Otsus-11 Juni 2025



Rapat Kerja Kepala Daerah Se-Provinsi Papua Barat Daya-16 Juni 2025



Pertemuan dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya (Asisten I)-17 Juni 2025



SHEK BP3OKP Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya dan Kemendagri (Bangda)-18 Juni 2025



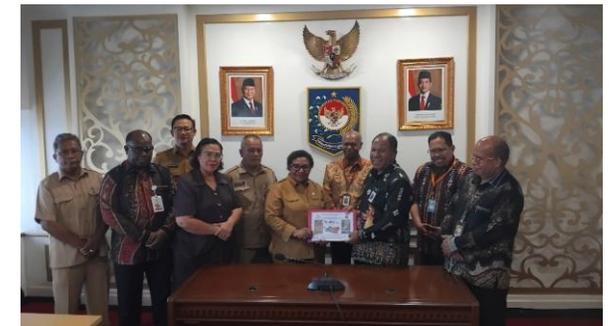
SHEK BP3OKP dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan-19 Juni 2025



Pertemuan dengan ASRI (Yayasan Alam Sehat Lestari)-20 Juni 2025



Rapat Rencana Seminar Nasional Desentralisasi Asimetris Papua-23 Juni 2025



SHEK Percepatan Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua (Pembahasan Isu-isu Strategis Perkembangan Implementasi Otonomi Khusus Papua)-24 Juni 2025



KEGIATAN STRATEGIS BERSAMA

Selama bulan Juni 2025, BP3OKP Papua Barat Daya melalui pelaksanaan Program Strategis Bersama (PSB) secara aktif melaksanakan Tugas dan Fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) yang melibatkan seluruh Pokja (Sehat, Cerdas, dan Produktif). Kegiatan yang dilakukan mencakup audiensi, FGD, rakor, dan dialog strategis yang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan dan optimalisasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua di wilayah Papua Barat Daya.

✦ Capaian Utama per Pokja:

◆ Pokja Papua Sehat

Terlibat aktif dalam Rapat Kerja Kepala Daerah dan koordinasi dengan Yayasan ASRI, dengan fokus pada isu kesehatan masyarakat adat, kekurangan tenaga medis, serta penanganan stunting dan malaria. Mendorong penyelarasan program kesehatan antara ASRI dan pemerintah daerah serta pemenuhan data kesehatan terpilah Orang Asli Papua (OAP). Mengusulkan beasiswa untuk dokter spesialis dan pendidikan kader kesehatan kampung.

◆ Pokja Papua Cerdas

Berperan dalam penguatan interoperabilitas sistem perencanaan dan keuangan (SIPD, SIPPP, dan SIKD) untuk mendukung akuntabilitas dana Otsus. Mensosialisasikan konsep dan persiapan Laporan Tahunan BPP dan Otsus, serta merumuskan desain Seminar Nasional Desentralisasi Asimetris. Memastikan RPJMD dan program prioritas daerah selaras dengan RIPPP dan kebijakan nasional.

◆ Pokja Produktif

Aktif dalam mendukung ekonomi lokal melalui koperasi dan BUMDes. Mendorong program prioritas nasional seperti Koperasi Merah Putih, One Village One Product (OVOP), dan pemanfaatan Dana Otsus untuk peningkatan pendapatan OAP.

◆ Seluruh Pokja

Aktif dalam review Dokrenda, baik secara menyeluruh maupun khusus sesuai misi/program percepatan RIPPP (Sehat, Cerdas, dan Produktif), serta aktif dalam FGD percepatan penyaluran Dana TKD dan Dana Desa, serta rapat evaluasi RPJMD bersama Bangsa Kemendagri. Menyoroti perlunya penguatan peran kepala daerah dalam pemenuhan syarat salur TKD, dan menyusun RAP tepat waktu.

✦ Isu Strategis yang Diangkat:

Masih banyak pemda yang belum memenuhi syarat salur Dana TKD, mengakibatkan keterlambatan transfer ke daerah. Ketimpangan kualitas SDM, lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan data terpilah OAP, dan ketidaksesuaian RPJMD dengan RIPPP. Perlunya penguatan sistem digital, peningkatan kapasitas OPD, serta perlindungan sosial berbasis kebutuhan masyarakat adat.

✓ Tindak Lanjut yang Direkomendasikan:

BP3OKP terus mengawal revisi RPJMD agar sesuai RIPPP; Perlu percepatan interoperabilitas sistem dan pembangunan helpdesk teknis provinsi; Perlunya pendampingan intensif dari pusat untuk OPD dalam penyusunan RAP; Penetapan mekanisme reward and punishment bagi Pemda dan anggota BP3OKP untuk meningkatkan kinerja; Persiapan penyelenggaraan Seminar Nasional Desentralisasi Asimetris Papua sebagai forum evaluasi 25 tahun Otsus.

Capaian & Rekomendasi





CAPAIAN

Sepanjang bulan Juni 2025, BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya berhasil melaksanakan sejumlah kegiatan strategis yang mencerminkan penguatan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi dalam mendukung percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Kegiatan yang tersebar di berbagai wilayah ini mencakup forum strategis audiensi, FGD, hingga rapat koordinasi dengan Kementerian/lembaga pusat maupun pemerintah daerah.

Beberapa capaian BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya periode bulan Juni 2025 antara lain :

- 1. Penguatan Perencanaan Dokrenda** : BP3OKP berperan aktif dalam review dan sinkronisasi Dokumen Perencanaan Daerah, dalam hal ini yaitu RPJMD Kabupaten Sorong Selatan dan Provinsi Papua Barat Daya agar selaras atau mengacu pada RIPP, RPJMN, dan kebijakan Otsus (arah kebijakan paradigma baru pembangunan dan Otsus Papua). Beberapa rekomendasi juga diberikan terkait indikator kinerja, data OAP, dan harmonisasi lintas sektor.
- 2. Pendampingan Isu Strategis Eksodus Maybrat** : Melalui pertemuan dengan Ketua Tim Pemulangan Eksodus, BP3OKP memperoleh data kondisi riil pengungsi dan merumuskan strategi pemulihan sosial dan layanan dasar. Data rekomendasi strategis akan disampaikan kepada Pemda dan OPD Teknis serta kepada Presiden melalui Forum Gubernur Se-Tanah Papua.
- 3. Kemitraan dengan Masyarakat Sipil dan Lembaga Adat** : BP3OKP menerima aspirasi dari Asosiasi Mama-Mama Se-Tanah Papua yang mengajukan harapan keterlibatan peran yang lebih besar dalam program afirmatif seperti MBG dan Koperasi.
- 4. SHEK dengan Kementerian/Lembaga** : SHEK strategis dilakukan dengan Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat dan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam pemenuhan syarat salur dan pengelolaan TKD, serta pengembangan Koperasi Merah Putih serta UMKM OAP.
- 5. Percepatan dan Penguatan Misi Papua Cerdas** : Melalui kampanye komitmen wajib belajar yang dilaksanakan di Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, pendampingan implementasi SSH dan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tambrau, serta evaluasi program Sekolah Gratis di Kota Sorong, BP3OKP menekan pentingnya pendidikan afirmatif dan pemenuhan hak dasar pendidikan bagi OAP, serta sebagai salah satu kiat untuk menekan atau menurunkan Angka Putus Sekolah.
- 6. Rapat Kerja dan Koordinasi Lintas Daerah** : Rapat kerja Kepala Daerah se-Papua Barat Daya berhasil menyatukan arah kebijakan pembangunan, menghasilkan pakta integritas penyalarsan RKPD dan RPJPD (Dokrenda) dengan RIPP (Dasar Hukum Paradigma Baru Pembangunan Papua) serta rekomendasi strategis untuk pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi produktif.



REKOMENDASI UMUM

Rekomendasi umum berdasarkan capaian antara lain :

- 1. Perlu Diperkuatnya Integrasi Perencanaan dan Regulasi** : Pemerintah daerah perlu lebih konsisten dalam menjadikan RIPP dan RPJMN sebagai acuan utama penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD), untuk memastikan arah pembangunan daerah tidak keluar dari kerangka strategis nasional dan kekhususan Papua. Optimalisasi koordinasi antar-OPD untuk menghindari tumpang tindih dan memperkuat efektivitas perencanaan.
- 2. Perlu Komitmen Kepala Daerah dalam Pemenuhan Syarat Salur TKD** : Kepala daerah diharapkan menunjukkan komitmen penuh dalam memenuhi syarat-syarat penyaluran TKD, mengingat keterlambatan salur berdampak langsung pada pelaksanaan program pembangunan daerah. Apabila memungkinkan, diperlukan penyederhanaan mekanisme dan format syarat salur oleh pemerintah pusat agar lebih sederhana, adaptif, efisien, serta tidak menjadi hambatan teknis yang kompleks dalam memenuhi dokumen syarat salur.
- 3. Penguatan Sistem dan Data Orang Asli Papua (OAP)** : Penting dilakukan pendataan OAP yang akurat, terpilah, dan terverifikasi dengan melibatkan MRP, tokoh adat, serta dukungan teknologi informasi. Data ini menjadi dasar perencanaan afirmatif dan mencegah ketimpangan dalam distribusi program dan anggaran.
- 4. Peningkatan Kapasitas OPD Daerah dan Literasi Regulasi** : Banyak temuan menunjukkan rendahnya pemahaman OPD terhadap regulasi perencanaan dan anggaran. Pelatihan terpadu dan pendampingan teknis perlu dilakukan secara berkala, terutama terkait perencanaan berbasis RIPP, pemanfaatan Dana Otsus, dan interoperabilitas sistem (SIPD-SIKD-SIPPP).
- 5. Penguatan Peran Koperasi Merah Putih dan UMKM OAP** : Kementerian Koperasi dan Pemda perlu mempercepat penyusunan petunjuk teknis Koperasi Merah Putih, menyederhanakan proses legalitas, dan memberikan akses pembiayaan inklusif serta pelatihan yang sesuai dengan konteks lokal.
- 6. Optimalisasi SHEK sebagai Instrumen Pengawasan dan Advokasi** : BP3OKP perlu terus memanfaatkan forum SHEK sebagai alat kontrol, koordinasi, dan advokasi lintas kementerian/lembaga, serta mendorong implementasi reward dan punishment terhadap pemda dan BPP atas kinerja pelaksanaan Otsus.
- 7. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi Lintas Pihak** : Kolaborasi antara BP3OKP, kementerian/lembaga pusat, pemda, masyarakat adat, dan organisasi sipil perlu diperkuat untuk memastikan pendekatan pembangunan benar-benar partisipatif, terarah, dan kontekstual.
- 8. Fokus pada Program Strategis Afirmatif dan Pemenuhan Hak Dasar** : Penanganan eksodus, pendidikan OAP, kesehatan masyarakat pinggiran, dan pemberdayaan ekonomi perempuan Papua harus menjadi prioritas utama dalam alokasi Dana Otsus dan program strategis daerah.

Penutup

Demikian penyampaian **Laporan Percepatan Pembangunan Papua** Periode Bulan Juni 2025 **Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya.**

